

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Teori Fenomenologi

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, *Phainoai*, yang berarti ‘menampak’ dan *phainomenon* merujuk pada ‘yang menampak’. Istilah ini diperkenalkan oleh Johann Heirinch. Istilah fenomenologi apabila dilihat lebih lanjut berasal dari dua kata yakni; *phenomenon* yang berarti realitas yang tampak, dan *logos* yang berarti ilmu. Maka fenomenologi dapat diartikan sebagai ilmu yang berorientasi untuk mendapatkan penjelasan dari realitas yang tampak. Lebih lanjut, Kuswarno menyebutkan bahwa Fenomenologi berusaha mencari pemahaman bagaimana manusia mengkonstruksi makna dan konsep penting dalam kerangka intersubektivitas (pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain).¹

Alfred Schutz merupakan orang pertama yang mencoba menjelaskan bagaimana fenomenologi dapat diterapkan untuk mengembangkan wawasan ke dalam dunia sosial. Schutz memusatkan perhatian pada cara orang memahami kesadaran orang lain, akan tetapi ia hidup dalam aliran kesadaran diri sendiri. Perspektif yang digunakan oleh Schutz untuk memahami kesadaran itu dengan

¹ Engkus Kuswarno, Fenomenologi; *fenomena pengemis kota Bandung*. (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009), 2.

konsep intersubyektif. Yang dimaksud dengan dunia intersubyektif ini adalah kehidupan-dunia (*life-world*) atau dunia kehidupan sehari-hari.²

Dunia kehidupan sehari-hari ini membawa Schutz mempertanyakan sifat realitas sosial para sosiolog dan siswa yang hanya peduli dengan diri mereka sendiri. Dia mencari jawaban dalam kesadaran manusia dan pikirannya. Baginya, tidak ada seorang pun yang membangun realitas dari pengalaman *intersubjective* yang mereka lalui. Kemudian, Schutz bertanya lebih lanjut, apakah dunia sosial berarti untuk setiap orang sebagai aktor atau bahkan berarti baginya sebagai seorang yang mengamati tindakan orang lain? Apa arti dunia sosial untuk aktor/subjek yang diamati, dan apa yang dia maksud dengan tindakannya di dalamnya? Pendekatan semacam ini memiliki implikasi, tidak hanya untuk orang yang kita pelajari, tetapi juga untuk diri kita sendiri yang mempelajari orang lain.³ Instrument yang dijadikan alat penyelidikan oleh Schutz adalah memeriksa kehidupan bathiniah individu yang direfleksikan dalam perilaku sehari-harinya.⁴

Schutz meletakkan manusia dalam pengalaman subjektif dalam bertindak dan mengambil sikap dalam kehidupan sehari-hari. Dunia tersebut adalah kegiatan praktis. Manusia mempunyai kemampuan untuk menentukan akan melakukan apapun yang berkaitan dengan dirinya atau orang lain. Apabila kita ingin menganalisis unsur-unsur kesadaran yang terarah menuju serentetan

² George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj Alimandan, (Jakarta: Kencana, 2007), 94.

³ Ajiboye, Emmanuel Olanrewaju, *Social Phenomenologi of Alfred Schutz and the Development of African Sociology*, (British Journal of Arts and Social Sciences, Vol.4. No.1 2012)

⁴ Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian, dan Perbandingan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 233.

tujuan yang berkaitan dengan proyeksi dirinya. Jadi kehidupan sehari-hari manusia bisa dikatakan seperti proyek yang dikerjakan oleh dirinya sendiri. Karena setiap manusia memiliki keinginan-keinginan tertentu yang itu mereka berusaha mengejar demi tercapainya orientasi yang telah diputuskan.⁵

Lebih lanjut, Schutz menyebutnya dengan konsep motif. Yang oleh Schutz dibedakan menjadi dua pemaknaan dalam konsep motif. *Pertama*, motif *in order to*, *kedua*, motif *because*. Motif *in order to* ini motif yang dijadikan pijakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertujuan mencapai hasil, sedangkan motif *because* merupakan motif yang melihat kebelakang. Secara sederhana bisa dikatakan pengidentifikasian masa lalu sekaligus menganalisisnya, sampai seberapa memberikan kontribusi dalam tindakan selanjutnya.⁶

B. Teori Elit

Pembahasan tentang elit dalam kerangka teoritik ini merujuk pada konsepsi yang telah dikemukakan oleh Vilfredo Pareto (1828-1923) dan Goetano Mosca (1858-1941). Tujuan dituliskannya teori elit dalam penelitian ini kurang lebihnya sebagai alat untuk mengetahui, siapakah yang dimaksud elit nahdliyin sekaligus menegaskan kaum nahdliyin yang dijadikan objek dalam penelitian ini.

⁵ Ibid., 235- 237.

⁶ Ibid., 270.

Asumsi dasar teori ini adalah dalam semua masyarakat selalu ada distribusi kekuasaan yang tidak merata. Sehingga memunculkan kelas dalam sebuah masyarakat. Mosca membagi kelas kedalam dua bagian. *Pertama*, kelas yang berkuasa, *kedua*, kelas yang dikuasai. Elit yang berkuasa apabila dilihat dari sisi jumlah lebih sedikit, akan tetapi ia melaksanakan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan menikmati keistimewaan. Maka bagi kelas yang dikuasai menerima kebalikan dari yang telah dimiliki oleh kelas yang berkuasa.⁷

Mosca menyebutkan yang membedakan karakter elit adalah kecakapan untuk memimpin dan menjalankan kontrol. Meskipun kelas yang memerintah tersebut kehilangan kepercayaan dan orang-orang diluar kelas tersebut, mempunyai kecakapan yang lebih baik. Maka terdapat kemungkinan bahwa kelas yang berkuasa akan dijatuhkan dan digantikan oleh penguasa baru. Mosca juga menegaskan bahwa dalam setiap masyarakat ada dan harus ada suatu minoritas yang menguasai anggota masyarakat yang lain. Minoritas itu adalah kelas politik atau elit yang memerintah yang terdiri mereka yang menduduki jabatan-jabatan komando politik dan secara lebih tersamar, mereka yang dapat langsung mempengaruhi keputusan-keputusan politik.⁸

Akan tetapi, kelompok elit kalau ditelaah dari segi sifat dan karakternya, sebenarnya bukan kelompok yang heterogen. Kelompok elit politik dibagi menjadi tiga tipe. *Pertama*, elit politik yang dalam segala tindakan berorientasi pada kepentingan pribadi atau golongan. Elit tipe ini cenderung

⁷ TB Bottomore, *Elit dan Masyarakat*, 86.

⁸ Yusron, *Elit Lokal dan Civil Society: Kediri ditengah demokratisasi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009), dalam Tesis Jumari, *Peran Elit Dan Basis Sosial Partai Demokrat Dalam Pemiluakada Depok Tahun 2010*, edisi digital, 34.

bersifat tertutup, dalam arti menolak golongan elit yang bukan elit untuk memasuki lingkungan elit. Diantara sesama elit tipe ini mengembangkan kolaborasi untuk mempertahankan keadaan yang ada. Oleh karena itu pelapisan sosial politik tidak hanya berbentuk piramid dan hierarki, namun juga tidak tanggap atas aspirasi dan tuntutan masyarakat. Elit ini disebut elit konservatif karena sikap dan perilaku yang cenderung memelihara dan mempertahankan struktur masyarakat yang secara jelas menguntungkannya.⁹

Kedua, elit politik liberal. Elit ini memiliki sikap dan perilaku yang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi setiap warga untuk meningkatkan status sosial. Elit ini cenderung bersifat terbuka terhadap golongan masyarakat yang bukan elit untuk menjadi bagian lingkungan elit, sepanjang yang bersangkutan mampu berkompetisi secara sehat untuk menjadi elit, dan menyesuaikan dengan diri dengan lingkungan yang elit. Adanya kesempatan yang sama dan kompetisi sehat untuk menjadi elit cenderung membuat pelapisan masyarakat bersifat pluralis. Elit politik cenderung berorientasi pada kepentingan masyarakat umum sehingga mereka juga akan responsif atas tuntutan masyarakat.

Ketiga, pelawan elit (*counter elite*). Tipe ini meliputi para pemimpin yang berorientasi pada khalayak baik dengan cara menentang segala bentuk kemapanan (*established order*) maupun dengan cara menentang segala bentuk perubahan. Ciri-ciri kelompok ini adalah ekstrim, tidak toleran, anti-intelektualisme, beridentitas superioritas rasial tertentu, dan menggunakan

⁹ Laili Bariroh, *Bahan Ajar Teori-Teori Politik*, Unpublished, 42.

kekerasan dalam memperjuangkan aspirasinya. Kelompok pelawan elit terdiri atas dua sayap, yakni sayap kiri (*left wing*) yang menuntut perubahan radikal dan revolusioner serta sayap kanan (*right wing*) yang menentang berbagai perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Namun kedua sayap ini memperlihatkan diri sebagai pembawa suara rakyat dan menuntut agar rakyat menguasai hukum, lembaga-lembaga, prosedur, dan hak-hak individu.

Lebih lanjut Robert D Putnam mengajukan tiga perspektif terkait dengan elit. *Pertama*, perspektif struktur atau posisi yang menganggap bahwa elit adalah mereka yang berkuasa atau menduduki posisi tertinggi dalam struktur organisasi formal. Perspektif posisi ini cenderung lebih mudah dan umum untuk mengetahui siapa yang berkuasa. *Kedua*, perspektif reputasional adalah pandangan yang memperlihatkan seseorang tidak harus dalam posisi organisasi formal, namun mengetahui atau menyaksikan mekanisme politik yang sedang berlangsung dari dekat. *Ketiga*, perspektif keputusan menyatakan bahwa elit adalah mereka yang memiliki pengaruh dan berhasil mengajukan inisiatif atau menentang usul-usul keputusan.¹⁰

Dari uraian diatas, setidaknya dapat diketahui konsep elit meliputi; *Pertama*, kelompok orang yang jumlahnya minoritas. *Kedua*, elit memiliki kekuasaan politik. *Ketiga*, elit dapat melakukan perintah kepada selain mereka dan pada massa yang tak terorganisir. *Keempat*, elit dapat mempengaruhi pada setiap perubahan yang meliputi daerah kekuasaannya.

¹⁰ Robert D. Putnam, *Studi Perbandingan Politik*, dalam Mohtar Mas, oed dan Colin Mac Andrew, *Perbandingan Sistem politik*, (Yogyakarta: GAMA Press, 2001), 91-94.

Sedangkan elit dalam konteks penelitian ini menggunakan perspektif keputusan. Karena elit nahdliyin yang menjadi politisi secara otomatis tidak bisa menduduki jabatan struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama, sehingga perspektif keputusan lebih tepat digunakan untuk memperjelas cakupan dalam penelitian ini. Hal ini bisa dilihat dalam Anggaran Rumah Tangga (ART NU) Bab XVI pasal 51.

Adapun kategori yang digunakan untuk melihat seseorang masuk kategorisasi elit nahdliyin atau tidak dalam penelitian ini; *Pertama* dia putra seorang kyai. Kyai merupakan tokoh dan atau pemegang keputusan sentral di dalam Nahdlatul Ulama. Ucapan dari seorang kyai di dalam tubuh NU bisa mewarnai aktivitas yang akan dilakukannya, bahkan fatwa seorang kyai mampu merubah sikap jajaran yang menduduki posisi struktural. Sehingga kedudukan kyai bukan hal yang *sepele*, oleh karena itu ketika kaum nahdliyin mengikuti fatwa-fatwa dari para kyai bukan hal yang aneh. Sebab kaum nahdliyin merupakan jama'ah yang berada dibawah Nahdlatul Ulama. Maka ketika seseorang yang menjalani takdir sebagai putra kyai memiliki pengaruh di lingkungannya yang dijadikan basis politiknya. *Kedua*, keberpengaruhannya seseorang dalam kategori elit nahdliyin ini, tercermin ketika tokoh tersebut mencalonkan diri sebagai legislator. Yang ditandai dengan kemampuannya menggalang massa (konstituen) untuk mengantarkan mereka menduduki kursi parlemen.

C. Konsep Partai Politik

Sejarah lahirnya partai politik dimulai pertama-tama di Negara-negara eropa barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri.

Di Negara-negara yang menganut paham demokrasi gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya menentukan kebijaksanaan umum. Di Negara-negara totaliter gagasan mengenai partisipasi rakyat didasari pandangan elit politiknya bahwa rakyat perlu dibimbing dan dibina untuk mencapai stabilitas yang langgeng. Untuk mencapai tujuan itu partai politik merupakan alat yang baik.

Pada awal perkembangannya di Negara-negara barat seperti inggris dan Perancis, kegiatan politik pada mulanya dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan raja. Dengan meluasnya hak pilih, kegiatan politik juga berkembang di luar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara para pendukungnya menjelang masa pemilihan umum. Oleh karena dirasa perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat, kelompok-

kelompok politik dalam parlemen lambat laun berusaha memperkembangkan organisasi massa dan dengan demikian terjalinlah suatu hubungan tetap antara kelompok-kelompok politik dalam parlemen dengan panitia-panitia pemilihan yang sepaham dan sekepentingan. Maka lahirlah partai politik.¹¹

1. Definisi Partai Politik

Partai politik secara umum adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dilakukan melalui konstitusionil untuk melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.¹²

Carl J. Friederik mendefinsikan partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material.¹³

2. Fungsi Partai Politik

Partai politik di dalam Negara demokrasi mempunyai fungsi yang strategis, fungsi-fungsi itu ialah; partai sebagai sarana komunikasi politik,

¹¹ Ibid., 159-160.

¹² Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1977), 132-133.

¹³ Ibid., 161.

partai sebagai sarana sosialisasi politik, partai sebagai sarana rekrutmen politik, partai sebagai sarana pengatur konflik.

Partai politik sebagai sarana komunikasi politik dalam menyalurkan berbagai macam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpang siuran pendapat dalam masyarakat berkurang.¹⁴

Dengan banyaknya pendapat yang diterima oleh partai politik, maka partai mempunyai tugas yang tidak ringan. Antara lain tugas yang dijalankan oleh suatu partai politik yakni menyatukan pendapat-pendapat yang masuk, kemudian memformulasikan menjadi program partai.

Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik, dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai salah satu sarana sosialisasi politik dalam usaha menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Maka dari itu partai politik harus memperoleh dukungan seluas-luasnya.¹⁵

Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, artinya partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Untuk mencapai tujuan itu partai politik biasanya menggunakan cara kontak pribadi, persuasi dan lain-lain.¹⁶

Partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Dalam praktek politik sering dilihat bahwa fungsi partai sebagai pengatur konflik dalam

¹⁴ Ibid., 163.

¹⁵ Ibid., 164.

¹⁶ Ibid.,

melakukannya kurang maksimal. Misalnya informasi yang disampaikan menimbulkan kegelisahan dan perpecahan, yang dikejar bukan kepentingan bersama, tetapi partai cenderung lebih mengejar kepentingan pribadi. Sebagai akibatnya terjadilah pengotakan politik atau konflik tidak terselesaikan, tapi malah dipertajam.¹⁷

Dari beberapa uraian tentang fungsi partai politik diatas. Maka dapat diambil suatu garis besar, bahwa peran serta partai politik didalam Negara yang mengaut sistem demokrasi mempunyai peran yang sangat vital. Oleh karena itu, setiap orang yang ada dalam partai politik tentu tidal bisa *asal-asalan*. Disatu sisi, setiap orang yang berada dalam suatu partai politik harus mempunyai kapasitas yang mumpuni dalam bidang politik. Disisi lain partai politik juga harus menerepkan sistem kaderisasi yang sedemikian rupa, agar dapat menghasilkan kader-kader siap mengemban tugas yang diberikan oleh rakyat.

¹⁷ Ibid.,

D. Konsep Perilaku Memilih

Menurut Ramlan Surbakti terdapat empat faktor yang yang mempengaruhi perilaku seorang aktor politik. *Pertama*, faktor lingkungan sosial politik tak langsung. Seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, dan media massa.¹⁸

Kedua, faktor lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor. Seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. Dalam lingkungan sosial politik langsung ini, seorang aktor mengalami sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat. Termasuk nilai dan norma kehidupan bernegara dan pengalaman-pengalaman hidup pada umumnya.

Ketiga, faktor struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Dalam hal ini terdapat tiga basis fungsional sikap yakni; kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi dan pertahanan diri. Basis yang pertama merupakan sikap yang menjadi fungsi kepentingan, maka penilaian orang terhadap suatu obyek ditentukan oleh minat dan kebutuhan atas objek tersebut. Basis yang kedua merupakan sikap yang menjadi fungsi penyesuaian diri. Artinya penilaian terhadap suatu objek dipengaruhi oleh keinginan untuk sesuai atau selaras dengan objek tersebut. Basis ketiga merupakan sikap yang menjadi fungsi eksternalisasi diri dan pertahanan diri. Artinya penilaian seseorang terhadap suatu objek dipengaruhi oleh keinginan untuk mengatasi konflik batin atau teanan psikis yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan diri dan eksternalisasi

¹⁸ Ibid., 160.

diri. Seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi, dan identifikasi dengan *aggressor*.

Keempat, faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan. Seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok dan ancaman dengan segala bentuknya.

Di dalam melihat kecenderungan seseorang menjatuhkan pilihan ke partai politik y atau lebih cenderung memilih pada partai politik x atau bahkan menjatuhkan sikap politik yang tidak berpihak pada partai politik manapun. Ramlan Surbakti mengajukan lima pendekatan yakni¹⁹; pendekatan Struktural, pendekatan Sosiologis, pendekatan Ekologis, pendekatan psikologis sosial, pendekatan pilihan rasional.

Pendekatan Struktural melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur sosial yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan, dan program yang ditonjolkan oleh setiap partai. Struktur sosial yang menjadi sumber kemajemukan politik dapat berupa kelas sosial atau perbedaan –perbedaan antara majikan dan pekerja, agama, perbedaan kota dan desa, dan bahasa dan nasionalisme.

Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Karakteristik sosial dan pengelompokan sosial mempunyai pengaruh signifikan dalam perilaku memilih. Oleh karena itu,

¹⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 145-146.

ketika aktifitas aktor politik menentukan arah politiknya didasarkan pada latar belakang demografi dan sosial-ekonomi. Seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama.

Pendekatan ekologis akan relevan apabila, dalam suatu daerah terdapat suatu perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit territorial. Seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Seperti di amerika serikat misalnya, terdapat distrik, *precint*, dan ward. Kelompok masyarakat seerti penganut agama tertentu, buruh, kelas menengah, mahasiswa, suku tertentu, subkultur tertentu, dan profesi tertentu bertempat tinggal pada unit territorial sehingga perubahan komposisi penduduk yang tinggal di unit territorial dapat dijadikan sebagai penjelasan atas perubahan hasil pemilihan umum.

Mengingat pentingnya pendekatan ekologi ini digunakan, karena seringkali terjadi perbedaan karakteristik data hasil pemilu tingkat provinsi dengan karakteristik data dalam tingkat kabupaten dan atau perbedaan karakteristik data tingkat kabupaten dengan karakteristik data tingkat kecamatan.

Pendekatan psikologi sosial, pendekatan ini merujuk pada persepsi pemilih terhadap partai-partai yang ada. Atau keterikatan emosional politisi dengan partai politik tertentu. Artinya partai politik yang secara emosional dirasakan dekat dengannya, maka itulah pilihan politiknya.

Pendekatan pilihan rasional. Dalam pendekatan ini semua kegiatan politik didasarkan pada kalkulasi untung dan rugi. Yang dijadikan pertimbangan oleh politisi bukan hanya “ongkos” ketika sudah menjatuhkan pilihan pada partai

politik tertentu, akan tetapi juga mempertimbangkan sampai berapa besar partai politik yang telah dipilihnya mampu memberikan suara pada dirinya. Hal ini umumnya terjadi ketika seseorang menginginkan untuk menjadi wakil rakyat (legislatif).

Pendekatan pilihan rasional mengasumsikan pemilih mempunyai kemampuan untuk menilai isu-isu politik yang diajukan. Kelompok masyarakat yang dapat menjadi pemilih rasional umumnya tidak begitu mempertimbangkan faktor kesamaan dalam lingkungan sosialnya, maupun ilatan emosional dengan partai tertentu.²⁰

E. Konsep Ideologi

1. Pengertian

Ideologi berasal dari bahasa Yunani *idea* yang berarti idea atau gagasan dan *logos* yang mempunyai arti studi tentang, ilmu pengetahuan tentang. Dalam arti melioratif, ideologi adalah setiap sistem gagasan yang mempelajari keyakinan-keyakinan dan hal-hal ideal filosofis, ekonomis, politis, sosial.²¹

Karl Mannheim menggunakan istilah *idea* untuk menunjuk kepada seperangkat kepercayaan, di mana terdapat perbedaan antara motif-motif yang terungkap dan mendasari. Ia membedakan antara ideologi parsial dan total. Yang terdahulu berasal-usul psikologis, sementara yang belakangan

²⁰ Muhammad Asfar, *Beberapa Pendekatan Dalam Memahami Perilaku Pemilih, dalam Jurnal Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), 16.

²¹ Loren Bagus, *Kamus Filasafat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), 306.

sosial.²² Yang dimaksud dengan ideologi parsial yakni ideologi lebih menghani benak dan diterima secara psikologis oleh warga masyarakat. Sedangkan ideologi total merupakan ciri khas yang menyangkut struktur pikiran pada abad atau kelompok tertentu, sekaligus ideologi lebih berhimpit pada *weltanschauung* yang didukung oleh struktur kolektif masyarakat. Manheim dengan tegas menyatakan bahwa dalam membicarakan ideologi kita tidak terlepas dari tiga tingkatan dalam berfikir, diantaranya; 1) tingkatan berfikir ideologi sebagai ideologi atau *ideology it self*. 2) tingkatan berfikir ideologi sebagai utopia 3) tingkatan berfikir ideologi sebagai *scientific thinking*.

Ideologi merupakan kata ajaib yang menciptakan pemikiran dan semangat hidup di antara manusia terutama kaum muda, khususnya diantara cendekiawan atau intelektual dalam suatu masyarakat.²³ Dapat dikatakan bahwa ideologi merupakan rumusan alam pikiran yang terdapat diberbagai subjek atau kelompok masyarakat yang dijadikan dasar yang kemudian direalisasikan. Dengan demikian, ideologi tidak hanya dimiliki oleh Negara, melainkan bisa dimiliki oleh sebuah organisasi dalam Negara, seperti partai politik atau asosiasi politik. Ideologi juga merupakan *mythos* yang meliputi *political doctrine* (doktrin politik) dan *political formula* (formula politik).²⁴

²² Ibid.,

²³ Ali Syariati dalam Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat; sejarah, filsafat, ideologi, dan pengaruhnya terhadap dunia ke-3*, cet, 2, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 238.

²⁴ Ibid., 238.

Gramsci membawa pengertian ideologi ke dalam dua bagian. *Pertama*, ideologi yang bersifat arbiter dan ideologi yang bersifat organis. Yang dimaksud ideologi yang bersifat arbiter adalah dimungkinkan adanya kesadaran palsu, sedangkan ideologi yang bersifat organis tidak dimungkinkan akan terjadi kesadaran palsu. Lanjutnya, ideologi organis merupakan suatu konsepsi tentang dunia yang dimanifestasikan dalam kesenian, hukum, kegiatan ekonomi.²⁵

Menurut Ali Syari'ati seorang yang menganut ideologi tertentu, haruslah membela dan meyakini apa yang tersirat didalamnya. Karena ideologi terdiri dari keyakinan, cita-cita yang diyakini oleh orang perorangan maupun secara kolektif. Baik dalam tataran kelas sosial maupun suatu bangsa dalam Negara.²⁶

2. Ideologi politik

Roger Eatwell mendefinisikan ideologi politik sebagai berikut;

“A political ideology is a relatively coherent set of empirical and normative beliefs of thought, focusing on the problem of human nature, the process of history, and socio-political arrangement. It is usually related to a program of specific short run concern. Depending on its relationship to the dominant value structure, an ideology can act as either a stabilizing or radical force. Single thinkers may embody the core of an ideology, but to call a single person an ‘ideologist’, or ‘ideologue’, would normally be seen as pejorative. The term of ‘political philosopher’ or ‘political theorist’, therefore, seems more appropriate for a thinker capable of developing a sophisticated level of debate. Political ideologies

²⁵ Roger Simon, *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, Ditetjemahkan Oleh Kamdani dan Imam Baehaqi (Yogyakarta: Insist Press bersama Pustaka Pelajar, 1999) 83-85.

²⁶ Ali Syari'ati, *Tugas Cedekiawan Muslim*, diterjemakan oleh Amien Rais, (Jakarta: Lentera, 1996), 156-157.

*are essentially the product of collective thought. They are 'ideal types', not to be confused with specific movement, parties or regimes which may bear their name.*²⁷

Ideologi politik merupakan suatu kesatuan yang padu atas kepercayaan berfikir berdasarkan norma dan secara empiris, berpusat pada permasalahan kebutuhan manusia, proses sejarah, dan adanya pengaturan sosial-politik. Hal itu pada umumnya dihubungkan dengan suatu program secara spesifik yang bertumpu pada jangka pendek. Tergantung pada hubungan antara struktur nilai yang dominan, suatu ideologi dapat bertindak sebagaimana suatu kestabilan atau kekuatan radikal. Pemikir tunggal bisa menjadi suatu inti dari suatu ideologi, tetapi untuk orang tunggal penganut ideologi atau ideolog, akan secara normal dilihat lebih tidak berkekuatan. Istilah ahli filsafat politik atau ahli teori politik, oleh karena itu, nampak lebih sesuai dengan suatu pemikiran yang dianggap mampu mengembangkan suatu tingkatan perdebatan yang dianggap mutakhir. Ideologi politik merupakan produk pikiran kolektif yang utama. Mereka adalah 'jenis ideal', tidak bisa dikacaukan atas pergerakan tertentu, partai-partai atau rezim yang mana mampu melahirkan nama mereka)

²⁷ Eatwell, Roger and Anthony Wright (Editor.), *Contemporary Political Ideologies*. (London and New York: Pinter, 1999) 17.

Dari definisi diatas tergambar bahwa ideologi politik dalam sebuah organ-organ politik akan dijadikan sebagai patokan dalam setiap perilakunya. Baik dalam lingkup internal organisasi maupun yang berhubungan dengan khalayak umum.

Ideologi politik yang berhubungan dengan khalayak umum dalam ilmu sosial dikenal dengan dua sebutan yaitu ideologi struktural dan ideologi fungsional. Ideologi secara struktural diartikan sebagai sistem pembenaran, seperti gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh penguasa. Sedangkan ideologi secara fungsional digolongkan menjadi dua, yakni ideologi yang doktriner dan ideologi yang pragmatis. Suatu ideologi dikatakan doktriner apabila ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi itu dirumuskan secara sistematis dan terinci dengan jelas. Diindoktrinasikan kepada warga masyarakat, dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai atau aparat pemerintah, akan tetapi, apabila ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi tersebut tidak dirumuskan secara sistematis dan terinci, melainkan dirumuskan secara umum (prinsip-prinsipnya saja). Dalam hal ini ideologi tidak diindoktrinasikan, tetapi disosialisasikan secara fungsioanal melalui kehidupan keluarga, sistem pendidikan, sistem ekonomi, kehidupan agama dan sistem politik.²⁸

Lebih lanjut Ramlan Surbakti, menyebutkan ideologi sebagai seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama, biasanya dirumuskan dalam bentuk tujuan yang hendak dicapai dan cara-cara yang digunakan untuk

²⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1992), 32-33.

mencapai tujuan. Ideologi dapat pula dirumuskan sebagai suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh suatu masyarakat, dan mengenai cara-cara yang paling baik dianggap baik untuk mencapai tujuan. Tujuan dan cara itu secara moral dianggap paling baik dan adil bagi penghayatnya untuk mengatur perilaku sosial warga masyarakat dalam berbagai segi kehidupan di dunia ini.²⁹

Dari dua rumusan itu dapat disimpulkan ada dua fungsi ideologi dalam masyarakat. *Pertama*, menjadi tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai bersama oleh suatu masyarakat. Dengan demikian, ideologi menjadi pedoman dalam membuat keputusan politik dan menjadi patokan (alat ukur) untuk menilai keberhasilan pelaksanaan keputusan politik. *Kedua*, sebagai pemersatu masyarakat, dan karenanya menjadi prosedur penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat.³⁰

3. Ideologi Partai Politik di Indonesia

Melihat ideologi partai politik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari percaturan politik bangsa ini yang berkembang di awal abad ke-20. Pergerakan dunia politik saat itu menghasilkan berbagai varian gerakan. Pengelompokan varian gerakan itu didasarkan pada garis agama, nasioanalisme, kesukuan dan ideologi.³¹

²⁹ Ibid., 48.

³⁰ Ibid.,

³¹ Parakitri T. Simbolan, *Menjadi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Tama, 2006), dalam laporan penelitian Muhadi Sugiono dan Wawan Mas'udi, *Peta Ideologi Partai Politik Peserta Pemilu 2009*, edisi digital (Yogyakarta, 2008), 5.

Pemetaan ideologi partai politik di Indonesia pertama kali dilakukan oleh Herbert Feith dan Lance Castle, yang kemudian dituliskan dengan judul *Indonesian Political Thinking 1945-1965*. Dalam karya tersebut digambarkan kekuatan dan aliran politik utama Indonesia terdiri dari; Komunisme, Nasionalisme, Radikal, Sosialisme Demokratis, Islam, dan Tradisionalisme Jawa.³² Selain kategori tersebut juga masih ada aliran politik lainnya seperti katolik dan kekuatan daerah. Selanjutnya menurut Muhadi, kategorisasi tersebut hanya bisa menggambarkan kluster sosial-politik masyarakat Indonesia dan transformasinya dalam organisasi politik. Namun studi tersebut tidak memberikan gambaran konkret karakter ideologis, apalagi instrumentasi ideologis partai dalam kebijakan. Pemetaan yang dilakukan Feith, hanya bisa menjangkau basis massa bagi partai politik, namun gagal menjangkau basis dan karakter ideologis parpol.³³

Di lain pihak, Komaruddin Hidayat dan M. Yudhie Haryono. Memberikan pandangan pemilahan ideologi partai politik ke dalam enam kelompok, yakni; Islam Tradisional, Islam Modern, Nasionalis, Sosial Demokrat, Marhaenisme, dan Kristen. Pemilhan ideologi tersebut berdasarkan yang dipaparkan dalam visi, misi, serta platform partai politiknya. Walaupun demikian apa yang dikemukakan dalam platform partai tidak selamanya merupakan cerminan dan ideologi partai politik. Banyak partai politik yang tidak selaras antara asas partai dengan realitas pemilih dan

³² David Bouchier dan Vedi R. Hadiz, *Pemikiran Sosial dan Politik Indonesia; periode 1965-1999*, (Jakarta: Freedom Institute, 2006), dalam laporan penelitian Muhadi Sugiono dan Wawan Mas'udi, *Peta Ideologi Partai Politik Peserta Pemilu 2009*, edisi digital (Yogyakarta, 2008), 5.

³³ Ibid.,

platform serta program-program partai. Lebih jauh, tingkah laku elit politik, kadang tidak mencerminkan ideologi dari partai yang diusungnya.³⁴

**Tabel Peta Ideologi 24 Partai Peserta Pemilu 2004
(Versi Komarudin Hidayat dan Yudhie Haryono)**

No.	Ideologi	Partai Politik
01.	Islam Tradisonalis	Partai Bintang Reformasi, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Kebangkitan Bangsa.
02.	Islam Modern	Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang.
03.	Nasionalis	Partai Golkar, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Patriot Pancasila, Partai Demokrat, Partai Persatuan Daerah, Partai Merdeka.
04.	Sosial Demokrat	Partai Indonesia Baru, Partai Buruh Sosial Demokrat, Partai Sarikat Indonesia, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan.
05.	Marhaenisme	PDI-P, PNBK, Partai Pelopor, PNI Marhaenisme.
06.	Kristen	Partai Damai Sejahtera.

Sumber: Komaruddin Hidayat dan M. Yudhie Haryono (2004).

Sementara Riswanda Imawan, menggambarkan pemilahan ideologi dengan lebih utuh. Karena tidak hanya didasarkan pada garis agama, melainkan ditambahkan sisi lain yakni *developmentalisme* yang merupakan bagaian dari ideologi kapitalis. Dengan doktrinnya yang lazim mengedepankan pembangunan ekonomi. Berikut ini partai-partai yang menurut Riswanda, mempunyai kecenderungan ke arah *developmentalisme*; PPP, PKB, PBB, PDKB, PK, dan Partai Krisna. Di sisi lain, partai nasionalis

³⁴ Asep Nurjaman, *Peta Baru Ideologi Partai Politik Indonesia*, Jurnal UMM, 140

yang cenderung ke arah developmentalis adalah partai Golkar. Partai Sektarian yang cenderung ke arah kelas adalah PAN, dan Partai Nasionalis yang cenderung ke arah kelas adalah PDIP dan PRD.³⁵

³⁵ Riswanda Imawan, dalam Asep Nurjaman.140